

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN MEI TAHUN 2021**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 | Fax. 0967-571216

Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul	1
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	7
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara	8
B. Tugas Pokok	8
C. Fungsi	8
D. Manajemen Kesekretariatan	9
1. Struktur Organisasi	10
2. Sumber Daya Manusia	11
3. Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi	13
4. Promosi, Mutasi dan Pensiun	14
5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)	14
6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP	14
7. Umum Dan Keuangan	16
7.1. Tata kearsipan Dan Perpustakaan	16
7.1.1. Pengelolaan Persuratan	16
7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan	16
7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan	16
7.2. Pengelolaan Aset dan BMN	17
7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan	17
7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN	22
7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN	22
7.3. Realisasi dan Penerimaan Anggaran	22
7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran	22
7.3.2. Laporan PNBPN	23
7.3.3. Data Persekot/ Uang Muka Gaji	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Mei secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	Kota / Kabupaten	Pusat pemerintahan
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Yahokimo	Sumohai
6.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
7.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
8.	Kabupaten Merauke	Merauke
9.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
10.	Kabupaten Boven Digul	Tanah Merah
11.	Kabupaten Mappi	Kepi
12.	Kabupaten Paniai	Enarotali
13.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia
14.	Kabupaten Waropen	Botawa
15.	Kabupaten Biak Numfor	Biak
16.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
17.	Kabupaten Asmat	Agats

18.	Kabupaten Nabire	Nabire
19.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
20.	Kabupaten Deyai	Tigi
21.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
22.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
23.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui
24.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
25.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
26.	Kabupaten Mimika	Timika
27.	Kabupaten Nduga	Kenyam
28.	Kabupaten Puncak	Ilaga
29.	Kabupaten Yalimo	Elekim

ii. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	Kota / Kabupaten	Pusat pemerintahan
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Fak-fak	Fakfak
4.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
5.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
6.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
7.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
8.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
9.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai
10.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
11.	Kabupaten Tambrau	Fef
12.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
13.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan

sebanyak 13 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009
8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

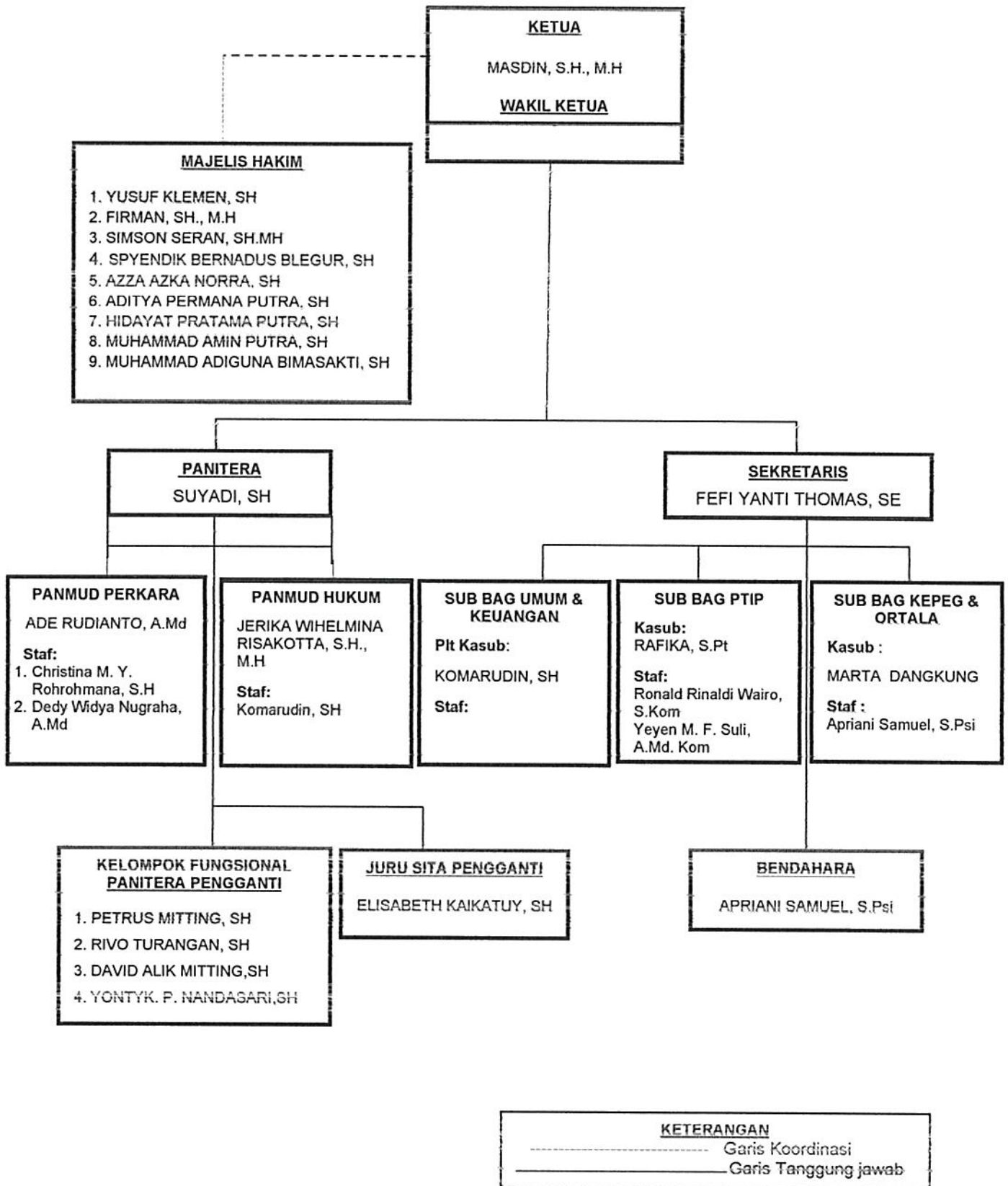
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

D. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 31 Orang yang terdiri dari:

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Ketua	Masdin, S.H., M.H	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Firman, SH., M.H.	
5.	Hakim	Simson Seran, SH., M.H.	
6.	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	
7.	Hakim	Azza Azka Norra, S.H., M.H.	
8.	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H	
9.	Hakim	Hidayat Pratama Putra, S.H	
10.	Hakim	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H	
11.	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	
12.	Panitera	Suyadi, S.H	
13.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
14.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
15.	Panitera Muda Hukum	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H	
16.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
17.	Panitera Pengganti	Rivo Turangan, S.H	
18.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
19.	Panitera pengganti	Yontyk. P. Nandasari, S.H., M.H	
20.	Jurusita Pengganti (Lokal)	Elisabeth Kaikatuy, S.H	
21.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
22.	Plt. Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Komarudin, S.H	
23.	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	
24.	Bendahara Pengeluaran	Apriani Samuel, S.Psi	
25.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Maturbongs, S.H., M.H	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura

26.	Staf bagian Kepegawaian	Apriani Samuel, S.Psi	
27.	Staf Umum Dan Keuangan	-	
28.	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Yeyen.M.F.Suli, A.Md.Kom	
29.	Staf Panitera Muda Perkara	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
30.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
31.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Dedy Widya Nugraha, A.Md	

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	Jabatan	Nama	Gol
1	Ketua	Masdin, S.H., M.H	IV/b
2	Wakil Ketua	-	-
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/a
4	Panitera	Suyadi, SH	IV/a
5	Panmud Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
6	Staf Hukum	Dr. Petrus Maturbongs, SH. MH.	III/d
7	Pamud Hukum	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H	III/d
8	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	III/d
9	Hakim	Firman, SH., MH	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, SH	III/d
11	Hakim	Simson Seran, SH.,MH	III/c
12	Kasub Kepegawaian	Marta Dangkung	III/d
13	Panitera Pengganti	Rivo Turangan, S.H	III/c
14	Kasub Bag. Perencanaan IT Dan Pelaporan	Rafika. S.Pt	III/c
15	Plt. Kasub Umum dan Keuangan	Komarudin, SH	III/b
16	Panitera Pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H., M.H.	III/b
17	Hakim	Hidayat Pratama Putra, SH	III/a
18	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, SH	III/a
19	Hakim	Azza Azka Norra, SH., MH	III/a
20	Hakim	Aditya Permana Putra, SH	III/a

21	Hakim	Muhammad Amin Putra, SH., MH	III/a
22	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, SH	III/a
24	Jurusita Pengganti	Elizabeth Kaikatuy, SH	III/b
25	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, SH	III/b
26	Bendahara	Apriani Samuel, S.Psi	III/a
27	Staf Panmud Perkara	Christina. M. Y. Rohrohmana, SH	III/a
28	Calon Pegawai Negeri Sipil	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
29	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Yeyen M.F. Suli., A.Md.Kom	II/c
30	Calon Pegawai Negeri Sipil	Dedy Widya Nugraha, A.Md	II/c

3. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 6. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

No	Nama	Jabatan Fungsional	Jabatan Administrasi lainnya
1	Yontyk P. Nandasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.
2	Rivo Turangan, S.H	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kepegawaian dan ORTALA	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan.
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
5	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Panitera Muda Perkara	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan.
6	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom.	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.

Tabel 7. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy	: diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan	Pengemudi
2.	Esti Sitinjak, S.Kom	: diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi	Pramubakti
3.	Rahmat	: diperbantukan di bagian Panmud perkara	Pramubakti
4.	Deik Bangkit Apriyanto	: diperbantukan di bagian perkara	Satpam

5.	Maikel kelyanin	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Pramubakti
6.	Syane Ratag, SE	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan	Pramubakti
7.	Ridwan Kristiawan	:	diperbantukan di bagian Panmud Hukum	Pengemudi
8.	Heni M. Klemen, SH	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi	Pramubakti
9.	Jhon Lewakabessy, ST	:	diperbantukan di bagian Panmud Hukum	Satpam
10.	Izak Pattipeilohy	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Pramubakti

4. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Mei mendapat promosi/ mutasi dan tidak terdapat pegawai yang pensiun.

Tabel 8. Data Promosi dan Mutasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Nama	Promosi/Mutasi	TMT
-	-	-	-

5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tabel 9. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat/Bimtek	Pelaksana
-	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Hakim Pratama	Penunjukan Tim dalam Kegiatan Penelitian Hukum Kajian Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Kumdil MA-RI
-	Aditya Permana Putra, S.H.	Hakim Pratama	Penunjukan Tim dalam Kegiatan Penelitian Hukum Kajian Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Kumdil MA-RI

	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.	Hakim Pratama	Penunjukan Tim dalam Kegiatan Penelitian Hukum Kajian Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Pusdiklat Kumdil MA-RI
--	-------------------------------------	------------------	--	---------------------------

6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh MARTA DANGKUNG sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh MARTA DANGKUNG sebagai user administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Nama Pegawai	Status	Keterangan
1	Masdin, S.H., M.H	Lengkap	-
2	Yusuf Kiemen, SH	Lengkap	-
3	Firman, S.H., M.H.	Lengkap	-
4	Simson Seran, S.H., M.H.	Lengkap	-
5	Spyendik Bernadus Blegur, SH	Lengkap	-
6	Azza Azka Norra, SH., MH	Lengkap	-
7	Aditya Permana Putra, SH	Lengkap	-
8	Hidayat Pratama Putra, SH	Lengkap	-
9	Muhammad Amin Putra, SH., MH	Lengkap	-
10	Muhammad Adiguna Bimasakti, SH	Lengkap	-
11	Suyadi, SH	Lengkap	-
12	Petrus P. Maturbongs, SH.,MH	Lengkap	-
13	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
14	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-

15	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
16	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
17	Marta Dangkung	Lengkap	-
18	Rivo Turangan, SH	Lengkap	-
19	Yontyk P.Nandasari, SH, MH	Lengkap	-
20	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
21	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
22	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
23	Komarudin, SH	Lengkap	-
24	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
25	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
26	Yeyen M.F.Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
27	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
28	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-

7. Umum dan Keuangan

7.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

7.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 11. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
1	Umum & Keuangan	2	21
2	Kepegawaian & Ortala	7	12
3	Perencanaan, IT dan Pelaporan	4	-
4	Kepaniteraan Perkara	3	50
5	Kepaniteraan Hukum	-	-

7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan September 2020 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

7.2. Pengelolaan Aset dan BMN

7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 237,6 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

**Tabel 12. Data Rumah Dinas pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	B	1992	1100 m2	120 m2
4	B	1992	1100 m2	120 m2
5	B	1992	1100 m2	120 m2
6	B	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Type	Luas Tanah	No.SK	Pengguna	Jabatan	Ket
1	B	700 M2	W4-TUN4/75/PL.01/III/2021	Masdin, S.H., M.H.	Ketua	
2	B	700 M2	-	-	Wakil ketua	
3	B	1100 M2	W4-TUN4/803/PL.01/VII/2020	Azza Azka Norah, SH	Hakim	
4	B	1100 M2	W4-TUN4/2000/PL.02.01/VII/2019	Firman, SH., MH	Hakim	
5	B	1100 M2	W4-TUN4/942/PL.02.01/VIII/2020	Simson Seran, SH., MH	Hakim	
6	B	1100 M2	W4-TUN4/460/PL.01/III/2021	Aditya Permana Putra, SH	Hakim	

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas

Tabel 14. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Nama Aset	Tahun	No.Plat	Kondisi	No.SK	Pengguna	Jabatan	KETERANGAN
1	Toyota Innova	2012	PA 1629 DT	Baik	W4-TUN4/77/PL.06/II/2021	MASDIN, S.H., M.H.	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	DS 4132 DZ	Baik	-	-	-	BELUM ADA SK
3	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	W4-TUN4/231/PL.06/II/2019	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	DS 5595 AC	Baik	W4-TUN4/219/PL.06/II/2019	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 16978 DZ	Baik	W4-TUN4/2325/PL.06/X/2019	DAVID ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W4-TUN4/245/PL.06/III/2021	MASDIN, S.H., M.H.	KETUA	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	Baik	-	-	-	BELUM ADA SK
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W4-TUN4 226./PL.06/ II /2020	RIVO TURANGAN, SH	PANITERA PENGGANTI	

9	Honda	2008	DS 6473 AE	Baik	W4-TUN4 /2090a/PL.07/IX/2019	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
10	Honda	2008	DS 6898 AE	Baik	W4-TUN4 /2312/PL.06/X/2019	FEFI YANTI THOMAS,SE	SEKRETARIS	
11	Honda	2005	DS 4133 DZ	Baik	W4-TUN4 /227/PL.06/II/2019	PETRUS MITTING,SH	PANITERA PENGGANTI	
12	Honda	2009	DS 6305 AF	Baik	W4-TUN4 /242/PL/06/II/2019	KOMARUDIN,S H	PLT. KASUB UMUM DAN KEUANGAN	
13	Honda	2009	DS 6216 AF	Baik	W4-TUN4 /241/PL.06/II/2019	ELIZABETH.K,S H	JURU SITA PENGGANTI	
14	Honda	2005	DS 4132 DZ	Baik	W4-TUN4 /227/ PL.06/II/ 2020	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	STAF PANMUD PERKARA	
15	Honda	2007	DS 6899 AE	Bik	W4-TUN4 / 229/PL.06/II/2019	ADE RUDIANTO. A.Md	PANMUD PERKARA	
16	Honda	2011	PA 4290 DZ	Baik	W4-TUN4 /1042/PL.06/VII/2019	YONTYK.P.N,S. H	PANITERA PENGGANTI	PEJABAT PENGADAAN
17	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W4-TUN4 /2487/ PL.06/XII/2019	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANMUD HUKUM	
18	Honda	2007	DS 3473 AE	Baik	W4-TUN4/247/ PL.06/II/2020	RAFIKA. S.PI	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 15. Daftar Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA RUANGAN DAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Sidang Utama	1	Baik
2	Ruang Sidang Kecil	1	Baik
3	Loby Depan	1	Baik
4	Loby Belakang	1	Baik
5	Ruang CCTV	1	Baik
6	Ruang Musholla	1	Baik
7	Ruang Posbakum	1	Baik
8	Ruang Bermain Anak dan Laktasi	1	Baik
9	Ruang Perpustakaan dan Fotocopy	1	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perkara	1	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik

12	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Baik
13	Ruang Ketua	1	Baik
14	Ruang Wakil	1	Baik
15	Ruang Tambahan	1	Baik
16	Ruang Hakim 1	1	Baik
17	Ruang Hakim 2	1	Baik
18	Ruang Panitera	1	Baik
19	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
20	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	1	Baik
21	Ruang Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	Baik
22	Ruang Server	1	Baik
23	Ruang Arsip	1	Baik
24	Pantry	1	Baik
25	Gudang	1	Baik
26	Cermin Besar	5	Baik
27	Rak Arsip	18	2 Rusak
28	Lemari Pakaian 3 Pintu	1	Baik
29	Lemari Pakaian 2 Pintu	1	Baik
30	Lemari Penyimpan Piring	1	Baik
31	Mesin Ketik 14-16inch	3	2 Rusak
32	Mesin Ketik 18-27inch	2	Rusak
33	Lemari Besi	11	3 Rusak
34	Lemari Kayu	44	8 Rusak
35	Rak Kayu	1	Baik
36	Filling Cabinet Besi	13	4 Rusak
37	Brankas	2	Baik
38	Papan Visual/Papan Nama	17	4 Rusak
39	White Board	2	Baik
40	LCD Projector	1	Baik
41	Papan Pengumuman	1	Baik
42	Stand Speaker	2	Baik
43	Stand Mic	2	Baik
44	Meja Kerja Kayu	120	29 Rusak
45	Kursi Besi/Metal	77	Baik
46	Kursi Kayu	91	3 Rusak
47	Sice	20	8 rusak

48	Bangku Panjang Kayu	34	Baik
49	Meja Komputer	2	Baik
50	Rangka	2	Baik
51	Tempat Tidur Lipat Besi	1	Rusak
52	Tempat Tidur Kayu	3	Rusak
53	Meja Telepon	1	Baik
54	Meja Resepsionis	2	Baik
55	Kasur/Springbed	7	Baik
56	Sketsel(pembatas Sidang)	2	Baik
57	Meja Makan Kayu	1	Baik
58	Kursi Fiber Glas/Plastik	70	1 Rusak
59	Pot Bunga	6	Baik
60	Jam Dinding	10	7 Rusak
61	Lemari Es	2	Rusak
62	AC Split	36	Baik
63	Kipas Angin	18	2 Rusak
64	Mixer	3	Baik
65	Televisi	7	Baik
66	Amplifier	3	Baik
67	Equalizer	1	Baik
68	Loudspeaker	10	2 Rusak
69	Sound System	1	Baik
70	Microphone	2	Baik
71	Microphone table stand	6	2 Rusak
72	UPS	2	Baik
73	Stabilizer	3	Baik
74	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
76	Tiang Bendera	5	Baik
77	Palaka	5	Baik
78	Kaca Hias	2	Baik
79	Dispenser	5	2 Rusak
80	Mimbar/Podium	2	Baik
81	Palu Sidang	3	1 Rusak
82	Handycam	1	Baik
83	Lambang Instansi	1	Baik

84	Gordyn	9	Baik
85	Kabel roll	9	1 Rusak
86	Asbak Tinggi	3	2 Rusak
87	Keset Kaki	6	Baik
88	Kabel	2	Rusak
89	Wireless Mic	6	Baik
90	Uninterruptible Power Supply	6	Baik
91	Camera Digital	1	Baik
92	Key Telephone	5	1 Rusak
93	Pesawat Telepon	12	9 Rusak
94	Telephone Mobile	2	1 Rusak
95	Faximile	3	Baik
96	Antene SHF Transportable	2	Rusak
97	Antena Parabola	2	Rusak
98	Receiver matrix	1	Baik
99	Genset	1	Baik
100	Alat Pemadam Kebakaran	1	Rusak
101	Generator	2	Rusak
102	UPS	4	Rusak
103	Microtic Internet	1	Baik
104	Komputer Jaringan	3	Baik
105	PC Unit	30	10 Rusak
106	Notebook	20	Baik
107	HardDisk	3	Baik
108	Printer	26	4 Rusak
109	Scanner	3	Baik
110	Server	2	Baik
111	Router	2	Baik
112	Rak Server	1	Baik
113	Rambu Papan Tambahan	1	Baik
114	Alat Tenis Meja	2	1 Rusak
115	Software Komputer	1	Baik

7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 DESEMBER 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Usulan penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

7.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Mei Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pogawai	3.931.291.000	614.900.637	1.922.992.577	2.008.298.423
2	Barang	1.568.657.000	93.392.180	366.051.446	1.202.605.554
3	Modal	265.000.000	-	-	265.000.000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Mei Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	54.400.000	4.800.000	9.600.000	44.800.000
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.2. Laporan PNBP

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Mei Tahun 2021 secara umum sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Penerimaan PNBP Bulan Mei Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Akun	Jenis Pendapatan	Bln ini	Sd Bln ini
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.559.460	5.418.714
2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		
3	425232	Uang Meja (Leges)	0	490.000
4	425233	Ongkos Perkara	0	1.750.000
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	5.692.000
		Total	1.559.460	13.350.714

Laporan realisasi PNBP secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.3. Data persekot/ Uang Muka Gaji

Pada Periode bulan Mei Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak mempunyai Persekot.

7.3.4. Ralat SPM

Pada bulan Mei Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura tidak terdapat Ralat SPM.

8. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

8.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Mei Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak melakukan revisi DIPA 01 maupun 05.

8.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2021 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

E. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Mei Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 19. Laporan Keadaan Perkara Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa sd bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dismisal
1	Gugatan	10	3	6	15	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Mei Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 20. Laporan Jenis Perkara Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Jenis Perkara	sisa bln lalu	bulan in	s/d bln in
1	Pertanahan	12	-	12
2	Kepegawaian	4	-	4
3	Perijinan	1	-	1
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	1
6	Badan Hukum/Parpoi	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Merek	-	-	-
18	Lain-lain	1	2	3
Total		18	3	21

1.3. Laporan jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.

Tabel 21. Laporan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Perkara yang tidak mengajukan	s/d Bln Lalu	Bulan Ini	s/d Bln ini
1	Banding	-	3	-
2	Kasasi	-	-	-
3	Peninjauan Kembali	-	-	-
4	Eksekusi	-	-	-
Total		-	3	-

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 4.0.1. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2021 belum bisa dilihat dikarenakan aplikasi SIPP MA sedang dalam perawatan atau maintenance. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/144/HM.02.3/I/2020 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/142/HM.02.3/I/2020 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 22. Buku Register Meja Informasi Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Pemohon	Tgl diterima	Obyek pemohon	Tindak Lanjut
1	H. Kumar, SH., MH.	06-05-2021	Salinan Putusan No. 02/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
2	Elisabeth Makagiarsar, SH.	21-05-2021	Salinan Putusan No. 64/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Yohanis Gewab, SH.	25-05-2021	Salinan Putusan No. 61/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
4	Hendrik Nanimindei (Tergugat II Intervensi)	25-05-2021	Salinan Putusan No. 61/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

5	Frisko Apriyanto (Polda Papua / Tergugat)	25-05-2021	Salinan Putusan No. 02/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
---	--	------------	---	-----------------------------

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 23. Buku Register Meja Pengaduan Bulan Mei 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subyek	No. Register
1	-	-	-	-

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Laporan penyerapan anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terlampir.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengeioaian arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum. Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang saat ini sedang kosong.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya renovasi/pembangunan pagar yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 7 Juni 2021


MARDIN, S.H., M.H.

NIP.19700424 199303 1004

L A M P I R A N

- Lampiran 1** : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01
- Lampiran 2** : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05
- Lampiran 3** : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01
- Lampiran 4** : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05
- Lampiran 5** : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN MEI 2021**

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (399139)
 PROPINSI : PAPUA (2800)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPAL TGL DIPAL : SP DIPAL- 005 01.2.539158/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020
 NO. DIPAL TGL DIPAL REVISI :

(dalam rupiah)

NO	KODE	JENIS BELANJAMA	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(5/4)	TOTAL	% 6=(7/4)	TOTAL	% 10=(8/4)	TOTAL	% 12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MAJUJEMEN										
	1068	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1068.EAA.001	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	534.777.000	368.183.150	39,39%	181.733.820	19,44%	549.917.100	58,83%	384.859.900	41,17%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	4.818	21,37%	2.948	12,39%	7.765	33,76%	15.235	66,24%	
	511121	Belanja Tunj. Sumilahan PNS	63.402.000	26.462.650	31,75%	13.544.420	19,24%	40.027.500	47,89%	43.374.700	52,01%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	24.383.000	8.642.188	35,44%	4.455.488	18,19%	13.077.878	53,83%	11.305.324	48,37%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32.780.000	9.360.000	28,57%	4.680.000	14,29%	14.040.000	42,86%	18.730.000	57,14%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.624.210.000	559.700.000	34,46%	283.030.000	17,43%	842.730.000	51,85%	781.480.000	48,11%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	343.868.000	73.736.878	21,48%	62.580.700	15,30%	125.357.378	38,75%	217.210.824	63,22%	
	511129	Belanja Tunj. Beras PNS	69.796.000	22.088.100	31,69%	11.080.260	15,89%	35.169.360	47,54%	36.599.640	52,48%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	257.664.000	66.148.000	25,28%	18.318.000	7,50%	84.487.000	32,76%	173.167.000	67,22%	
	611138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	208.040.000	73.810.000	35,38%	17.845.000	8,59%	91.855.000	43,64%	117.185.000	68,05%	
	511151	Belanja Tunjangan Umurni PNS	34.899.000	4.775.000	13,88%	2.570.000	7,39%	7.345.000	21,06%	27.551.000	78,95%	
	511157	Belanja Tunjangan Kematihan Hakim	316.900.000	86.090.000	30,30%	24.000.000	7,59%	120.000.000	37,96%	198.800.000	62,12%	
		JUMLAH KEGIATAN 1068.EAA.001	3.831.291.000	1.308.091.940	33,27%	614.800.637	15,84%	1.922.992.577	48,82%	2.008.298.433	51,08%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	374.570.000	86.011.000	22,98%	57.043.000	15,23%	143.054.000	38,19%	231.516.000	61,81%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	35.836.000	11.509.500	32,39%	10.085.180	28,09%	21.893.850	60,92%	14.042.020	39,08%	
	521611	Belanja Barang Peralaksanaan Barang Konsumsi	52.585.000	3.757.000	7,14%	955.000	1,82%	4.712.000	8,98%	47.873.000	91,04%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	234.500.000	83.740.801	27,18%	22.229.450	9,49%	65.970.251	36,66%	148.529.749	63,34%	
	521114	Belanja Penghantaran Surat Dinas Pos Pusat	42.000.000	6.644.900	15,44%	1.880.300	4,48%	7.024.800	16,73%	34.975.100	83,27%	
	522111	Belanja Langganan Listrik	180.000.000	60.337.231	33,56%	12.720.471	6,48%	63.057.702	42,04%	86.942.298	57,96%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	6.500.000	893.184	14,50%	660.614	9,89%	1.833.778	24,75%	4.966.222	76,25%	
	522113	Belanja Langganan Air	3.600.000	621.500	14,49%	825.000	22,92%	1.348.500	37,49%	2.253.500	62,60%	
	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	123.120.000	48.170.000	37,50%		0,00%	48.170.000	37,60%	76.950.000	62,50%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.534.000	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	106.534.000	100,00%	
	523118	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	86.721.000	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	86.721.000	100,00%	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.512.000	72.363.950	38,00%	16.889.497	8,89%	89.282.447	48,89%	101.229.553	53,14%	
	D. 521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.080.000	10.770.000	25,00%		0,00%	10.770.000	25,00%	32.310.000	75,00%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	28.900.000	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	28.900.000	100,00%	

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN MEI 2021**

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+7)	10	11=(4-9)	12	13
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA												
1	006.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	5.489.948,000	1.674.143,386	30%	738.380,649	13,43%	2.412.534,035	44%	3.087.413,986	56%	
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EAA.001	Layanan Perkantoran										
	001	Gaji Dan Tunjangan	3.931.291,000	1.308.091,940	33%	614.900,637	16%	1.922.992,577	49%	2.008.298,423	51%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.568.657,000	366.051,449	23%	123.480,012	8%	489.541,458	31%	1.079.115,542	69%	
	1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000,000	0	0%	740,000	14,80%	740,000	15%	4.260,000	85%	
	052	Non Operasional Saliter Daerah (Rapid Test)	5.000,000	0	0%	740,000	15%	740,000	15%	4.260,000	85%	
	1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal	285.000,000	0	0%	0	0,00%	0	0%	285.000,000	100%	
	1071.951 (052)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	285.000,000	0	0%	0	0%	0	0%	285.000,000	100%	
II	006.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	54.400,000	4.800,000	9%	4.800,000	8,82%	9.600,000	18%	44.800,000	82%	
	1059.BBA (051)	Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20.000,000	0	0%	0	0%	0	0%	20.000,000	100%	
	1059.QBA (051)	Pos Bantuan Hukum	33.000,000	4.800,000	15%	4.800,000	15%	9.600,000	29%	23.400,000	71%	
	1059.Q3A (051)	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1.400,000	0	0%	0	0%	0	0%	1.400,000	100%	
JUMLAH KESELURUHAN			5.824.348,000	1.678.943,386	29%	743.930,649	12,77%	2.422.874,036	42%	3.401.473,965	58%	
Jumlah Anggaran			Rp 5,824,348,000	Percentage								
Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA			Rp 2,422,874,036	41,60%								
Sisa Anggaran			Rp 3,401,473,965	58,40%								

Jayapura, 03 Juni 2021
Kusaga/Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN MEI 2021**

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (939139)
 PROFINSI : PAPUA (2600)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
 NO. DIPA/TGL DIPA : SP DIPA- 006/05.2.539139/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020
 NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI :

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAQU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET	
				TOTAL	% (6=5/4)	TOTAL	% (7/4)	TOTAL	% (8=7)	TOTAL	% (9/4)		TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	006.05.BF	PROGRAM PENEGAKKAN DAN PELAYANAN HUKUM											
	1099	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA											
	1099.BBA	Layanan Bantuan Hukum Peneerangan											
I	1099.BBA.001	Layanan Pengemban Sidang di Lingkungan Peradilan TUN											
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang											
	A. 521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Baya Pengamanan Sidang)	20.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.000.000	100,00%
		JUMLAH KEGIATAN 1099.001	20.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.000.000	100,00%
II	1099.G5A.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	051	Pos Bantuan Hukum											
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum											
	A. 521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbekum)	4.200.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.200.000	100,00%
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28.800.000	4.800.000	16,67%	4.800.000	16,67%	4.800.000	33,33%	19.200.000	66,67%		
		JUMLAH KEGIATAN 1099.001	33.000.000	4.800.000	14,55%	4.800.000	14,55%	9.600.000	29,09%	23.400.000	70,91%		

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(7/4)	10=(9/4)	11=(11/4)	12=(11/4)	13
	G. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.294,000	10.044,400	11,51%	0	0,00%	10.044,400	11,51%	77.219,600	88,45%	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.935,000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.935,000	100,00%	
	1. 524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000,000	300,000	6,00%	300,000	6,00%	600,000	10,00%	5.400,000	90,00%	
	K. 521131	Belanja Barang Operasional - Peningkatan Pandemi COVID-19	18.100,000	3.589,000	18,99%	412,500	2,18%	3.981,500	20,85%	15.118,500	79,15%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1.588.827,000	386.031,448	23,94%	123.490,012	7,87%	489.841,468	31,21%	1.078.115,542	68,79%	
	106.EAC.003	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADILAN										
	082	Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521241	Belanja Barang Non Operasional - Peningkatan Pandemi COVID-19 (Rapid Test)	5.000,000	0	0,00%	740,000	14,80%	740,000	14,80%	4.260,000	85,20%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	5.000,000	0	0,00%	740,000	14,80%	740,000	14,80%	4.260,000	85,20%	
	1071	PENGADAAN BARANG DAN PRABARANG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EAD.001	LAYANAN BARANG INTERNAL										
	082	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	A. 532111	Belanja Modal Perlatan Dan Mesin (PC Keperkeran)	37.500,000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	37.500,000	100,00%	
	B. 532111	Belanja Modal Perlatan Dan Mesin (Mesin antrian sidang)	27.500,000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	27.500,000	100,00%	
	C. 532111	Belanja Modal Perlatan Dan Mesin (Ruang sidang online)	200.000,000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	200.000,000	100,00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	265.000,000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	265.000,000	100,00%	
		JUMLAH KEBELURUHAN	6.789.948,000	1.674.143,388	28,01%	739.130,949	12,81%	2.413.274,038	41,82%	3.356.413,963	88,10%	

Jumlah Anggaran	6.789.948,000	Persentase
Realisasi Anggaran	2.413.274,038	41,82%
Sisa Anggaran	3.356.673,965	88,18%

Jayapura, 08 April 2021
 Kepala Pengadilan Negeri Jayapura
 Pengadilannya
 ARI KANTI THOMAS BE
 NIP. 197003042008002 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

FORM 01

TAHUN : 2021
 BULAN : Mei
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISETOR (Rp)
I		Pendapatan dari Pemindah tangan BMN				
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin				
		JUMLAH I			0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Rumah Dinas Bulan Mei 2021	1	0	1.559.460	1.559.460
		JUMLAH II			1.559.460	1.559.460
III		Pendapatan Jasa				
		JUMLAH III			0	0
IV		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
		JUMLAH IV			0	0
V		Pendapatan Denda I				
		JUMLAH V			0	0
VI		Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu				
		JUMLAH VI			0	0
VII		Pendapatan Pelunasan Piutang				
		JUMLAH VII			0	0
VIII		Pendapatan dari Penutupan Rekening				
		JUMLAH VIII			0	0
IX		Pendapatan Lain-lain				
		JUMLAH IX			0	0
X		Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang				
		JUMLAH X			0	0
XI		Pendapatan Jasa Lainnya				
		JUMLAH XI			0	0
XII		Pendapatan Bunga				
		JUMLAH XII			0	0
XIII		Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening				
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)				
		JUMLAH XIII			0	0
XIV		Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				
	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat				
		JUMLAH XIV			0	0
XV		Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I				
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu				
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu				
		JUMLAH XV			0	0
XVI		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan				
	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS				
	425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara				
		JUMLAH XVI			0	0
XVII		Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang				
		JUMLAH XVII			0	0
XVIII		Pendapatan Lain-lain II				
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain				
		JUMLAH XVIII			0	0
XIX		Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI - HAK UJI MATERIIL				


	JUMLAH XIX			0	0
	JUMLAH I s/d XVIII			1.559.460	1.559.460

Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Feni Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 31 Mei 2021
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
 JAYAPURA


 CHRISTINA MEGAWATI YULIANA
 ROHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNPB


FORM 01A

TAHUN : 2021
 BULAN : Januari - Mei
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PALAK	TARGET	JUMLAH VOLUME BULAN INI	TARIF PER VOLUME BULAN INI (Rp)	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
I		Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN						
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin						
		JUMLAH I		0		0	0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		0	0	3.859.254	1.559.460	5.418.714
		JUMLAH II		0		3.859.254	1.559.460	5.418.714
III		Pendapatan Jasa						
		JUMLAH III		0		0	0	0
IV		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan						
		JUMLAH IV		0		0	0	0
V		Pendapatan Denda I						
		JUMLAH V		0		0	0	0
VI		Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu						
		JUMLAH VI		0		0	0	0
VII		Pendapatan Pelunasan Piutang						
		JUMLAH VII		0		0	0	0
VIII		Pendapatan dari Penutupan Rekening						
		JUMLAH VIII		0		0	0	0
IX		Pendapatan Lain-lain						
		JUMLAH IX		0		0	0	0
X		Pendapatan atas pengelolaan BMN dan kekayaan Negara dari Pengelola Barang						
		JUMLAH X		0		0	0	0
XI		Pendapatan Jasa Lainnya						
		JUMLAH XI		0		0	0	0
XII		Pendapatan Bunga						
		JUMLAH XII		0		0	0	0
XIII		Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening						
		JUMLAH XIII		0		0	0	0

425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)								
	JUMLAH XIII		0				0		0
XIV	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara								
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat								
	JUMLAH XIV		0				0		0
XV	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I								
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu								
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu								
	JUMLAH XV		0				0		0
XVI	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Penulunan								
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Penulunan PNS								
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Penulunan Pejabat Negara								
	JUMLAH XVI		0				0		0
XVII	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang								
	JUMLAH XVII		0				0		0
XVIII	Pendapatan Lain-lain II								
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain								
	JUMLAH XVIII		0				0		0
XIX	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI - HAK UJI MATERIIL								
	JUMLAH XIX		0				0		0
	JUMLAH I s/d XIX		0			3.859.254	1.559.460		5.418.714


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Sekretaris
 Feb Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 31 Mei 2021
 Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

 CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP


FORM 01A

TAHUN : 2021
 BULAN : Januari - Mei
 NOMOR / TANGGAL DIPRA : SP DIPA - 005.05.2.539139/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PALAK	TARGET	JUMLAH VOLUME BULAN INI	TARIF PER VOLUME BULAN INI (Rp)	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
I		Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN						
		JUMLAH I		0			0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
		JUMLAH II		0			0	0
III		Pendapatan Jasa						
		JUMLAH III		0			0	0
IV		Pendapatan Kejaksaaan/Peradilan						
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		0	10.000	490.000	0	490.000
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		0			0	
	425239	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan lainnya		0	10.000	5.692.000	0	5.692.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara		0	30.000	1.750.000	0	1.750.000
		JUMLAH IV		0		7.932.000	0	7.932.000
V		Pendapatan Denda I						
		JUMLAH V		0			0	0
VI		Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu						
		JUMLAH VI		0			0	0
VII		Pendapatan Pelunasan Piutang						
		JUMLAH VII		0			0	0
VIII		Pendapatan dari Penutupan Rekening						
		JUMLAH VIII		0			0	0
IX		Pendapatan Lain-lain						
		JUMLAH IX		0			0	0
X		Pendapatan atas pengelolaan BMN dan kekayaan Negara dari Pengelola Barang						
		JUMLAH X		0			0	0
XI		Pendapatan Jasa Lainnya						
		JUMLAH XI		0			0	0
XII		Pendapatan Bunga						
		JUMLAH XII		0			0	0

XIII		Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Perutupan Rekening		0	0	0	0	0
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)						
		JUMMLAH XIII		0	0	0	0	0
XIV		Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		0	0	0	0	0
		JUMMLAH XIV		0	0	0	0	0
XV		Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu						
		JUMMLAH XV		0	0	0	0	0
XVI		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Penjualan						
		JUMMLAH XVI		0	0	0	0	0
XVII		Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang						
		JUMMLAH XVII		0	0	0	0	0
XVIII		Pendapatan Lain-lain II						
		JUMMLAH XVIII		0	0	0	0	0
XIX		Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI - HAK Uji MATERIIL						
		JUMMLAH XIX		0	0	0	0	0
		JUMMLAH I s/d XIX		0	7.932.000	0	7.932.000	0


 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Sekretaris
 Fafi Yarith Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 31 Mei 2021
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

 CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp/Fax : (0967) 571639 - 571216
email : jayapura @ ptun. org dan ptun. jayapura@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN MEI 2021

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	04-05-2021	Jimmi Monim	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE YULIYANTO,SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi tentang Masalah Kasus pembertentian tidak dengan hormat sebagai ASN dari kab. Serui Provinsi Papua terhadap 6 orang Pegawai ASN di Serui dan Diminta Syarat-syarat untuk pengajuan Gugatan di PTUN Papua	
2	-	11-05-2021	Hendrik Rumsowek		Pemohon	Konsultasi tentang Masalah Putusan Kontrak kerja dari PT. PLN Persero, Provinsi Papua, Papua Barat dengan Perusahaan PT. Rajawali TRI Perkasa ada terjadi Putusan sepihak, dan dari Pihak perusahaan telah membayar uang jaminan kerja tersebut	

Mengetahui :

M. MASDIN, SH., MH.
NIP. 197004241993031004

Jayapura, 31 Mei 2021

S. SYKADI, SH.
NIP. 197205151994031002

